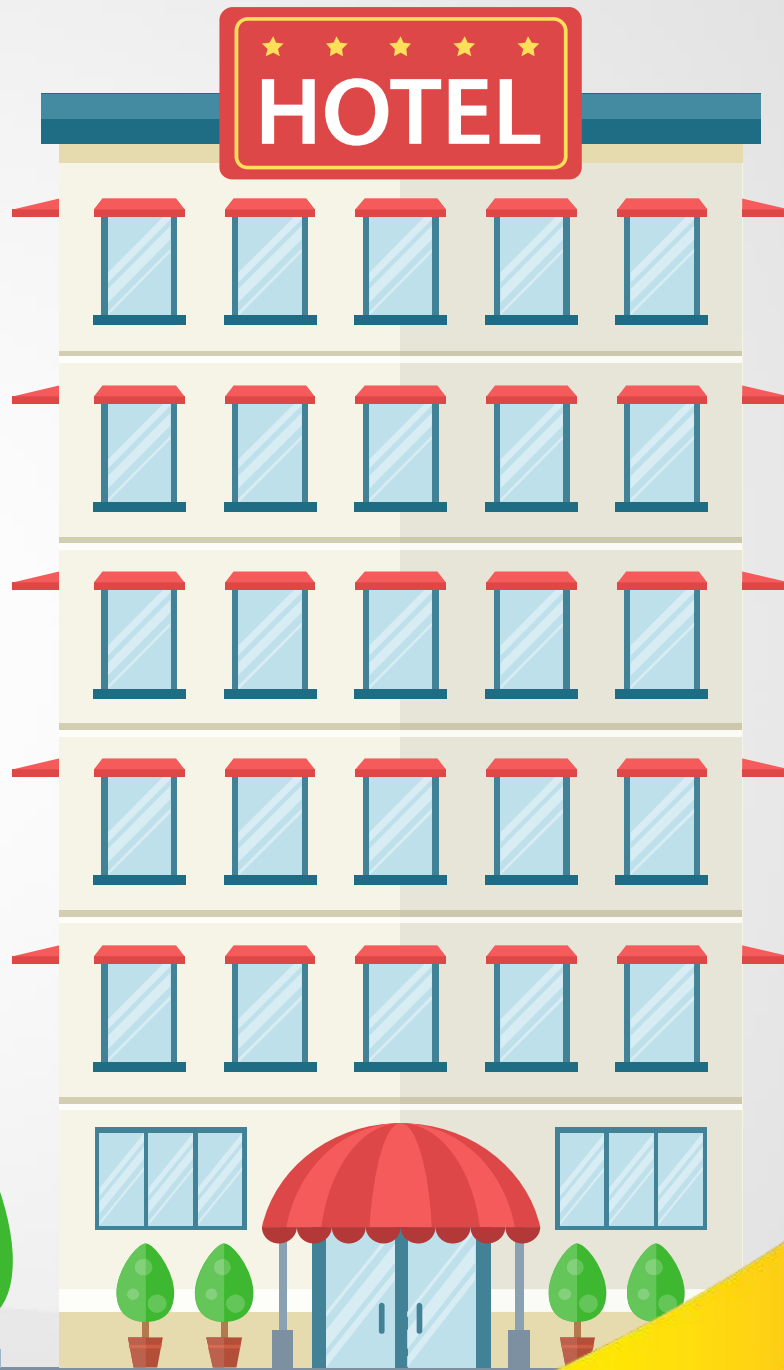


ASPEK PERPAJAKAN KEGIATAN USAHA HOTEL

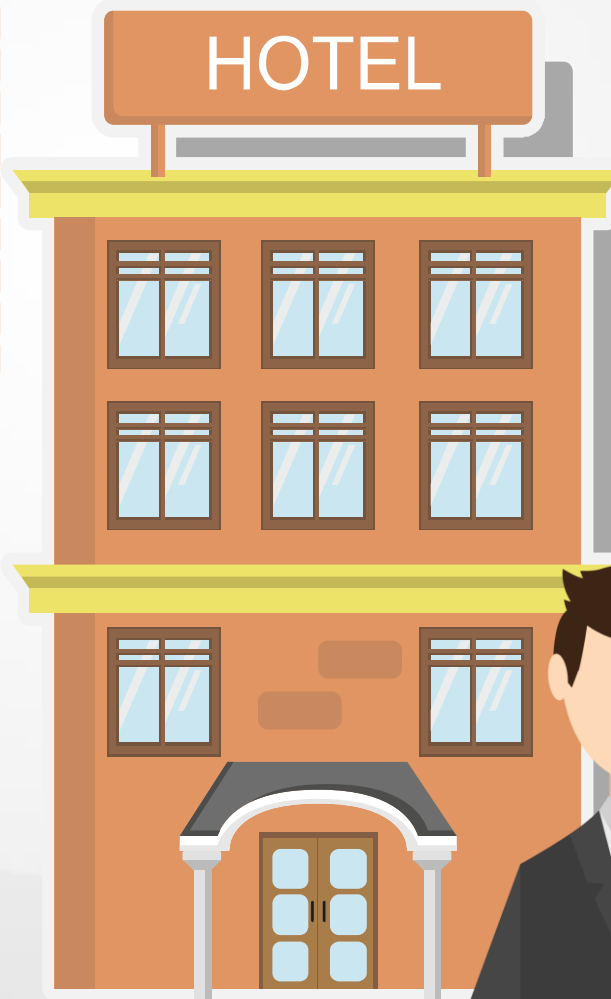


Definisi

Hotel adalah fasilitas
penyedia jasa
penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran

Operasional Hotel

**Dilakukan
sendiri**
oleh pengusaha
hotel



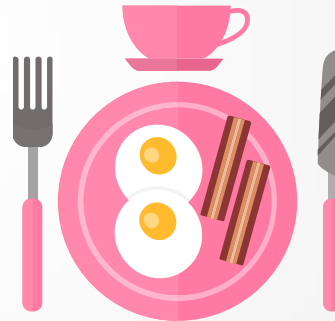
Menggunakan
jasa
pengelolaan
hotel

Sumber Penghasilan



penyewaan ruangan
untuk kegiatan acara atau
pertemuan (seminar,
workshop, meeting, dll)

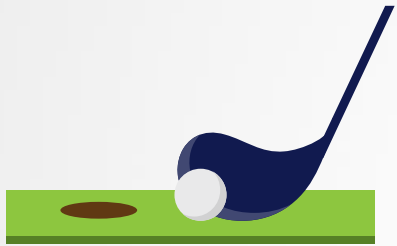
penyajian makanan
dan minuman



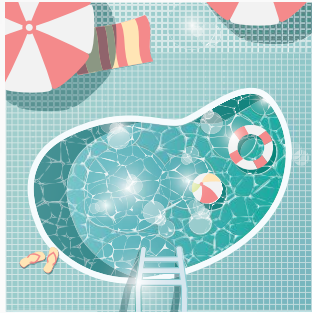
penyewaan kamar

Penghasilan
Utama

Sumber Penghasilan



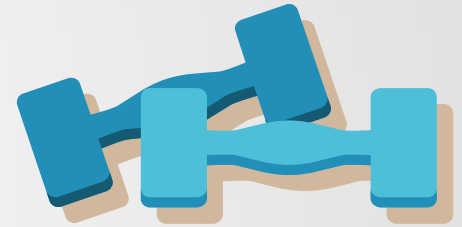
jasa lapangan
golf, tenis, dll



jasa water sport



persewaan
ruangan/bangunan
hotel (sewa untuk
toko/kios, dll.)



jasa fitness centre



jasa laundry

Penghasilan
Lainnya



*jasa massage
dan spa*

Objek Pajak Hotel

Objek PPh Final

Objek Pajak Daerah

Objek PPN



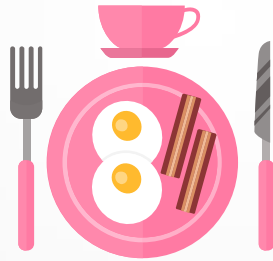
Pendapatan

Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Daerah



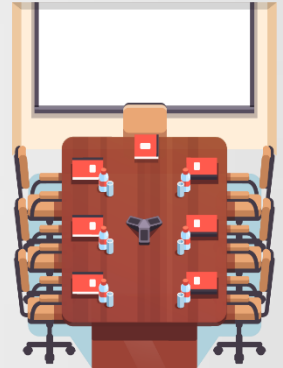
penyewaan kamar



penjualan
makanan dan
minuman



jasa *laundry*,
jasa *fitness centre*,
jasa *massage* dan *spa*,
untuk **tamu menginap**



Sewa ruangan/
function hall

Objek Pajak Hotel

Objek PPh Final



persewaan
ruangan/bangunan
hotel (sewa untuk
toko/kios, dll.)

Objek PPN



jasa *laundry*,
jasa *fitness centre*,
jasa *massage* dan *spa*,
untuk non tamu

Kewajiban Perpajakan



Daftar



Hitung

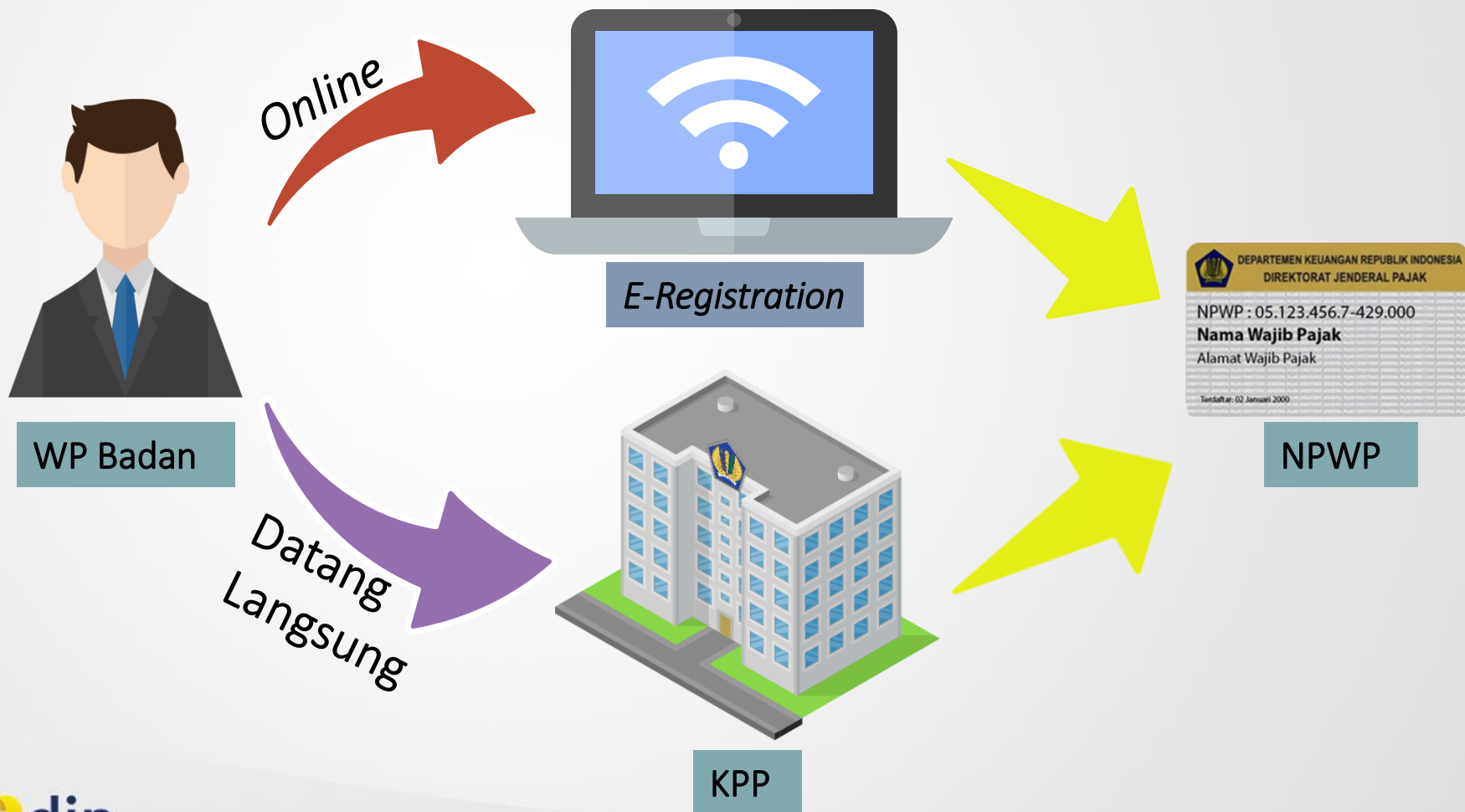


Bayar



Lapor

Daftar





Hitung



Seluruh Wajib Pajak Badan

WAJIB PEMBUKUAN



Hitung

JUMLAH SELURUH PENGHASILAN BRUTO	XXXX	
BIAYA	XXXX	
		(-)
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	XXXX	
KOREKSI FISKAL		
POSITIF	XXXX	
NEGATIF	(XXX)	(+)
PENGHASILAN NETO FISKAL	XXXX	
KOMPENSASI KERUGIAN	XXXX	
		(-)
PENGHASILAN KENA PAJAK	XXXX	
PPh TERUTANG	XXXX	
KREDIT PAJAK	XXXX	
DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA	XXXX	
TELAH DIBAYAR SENDIRI	XXXX	(+)
JUMLAH KREDIT PAJAK	XXXX	
		(-)
KURANG/LEBIH BAYAR	XXXX	

Tarif PPh Badan

25%

x **Penghasilan Kena Pajak**

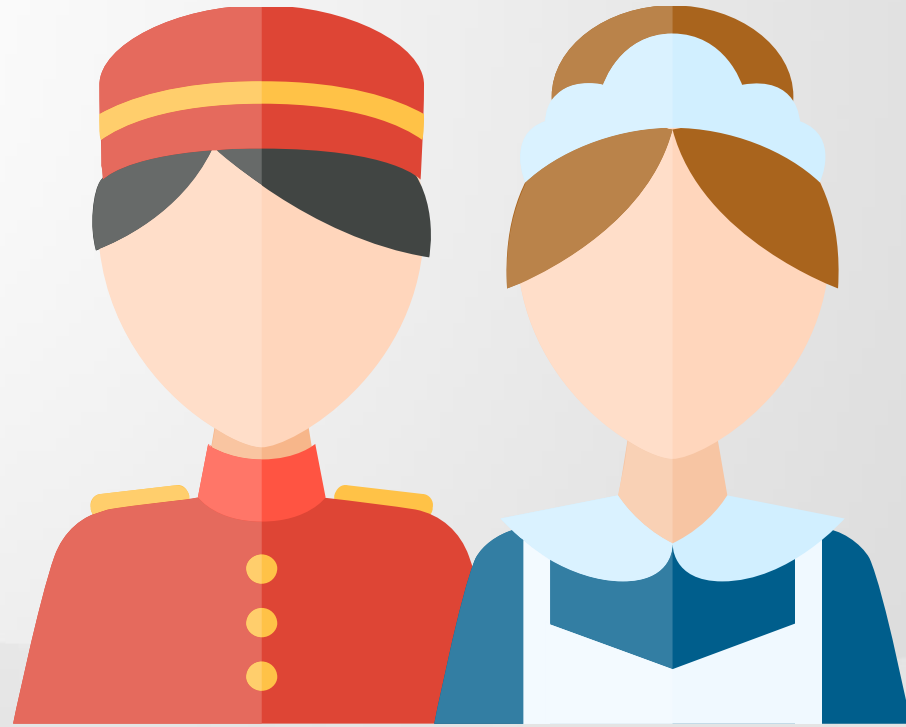
Fasilitas Pengurangan Tarif

- ☐ WP Badan dalam negeri dengan **omzet $\leq$ Rp50 Miliar** mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar **50% dari tarif normal**, yang dikenakan **atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto** sampai dengan Rp4,8 Miliar.
- ☐ Khusus untuk **Perseroan Terbuka** (minimal 40% saham dimiliki publik) mendapatkan pengurangan tarif **5%**.

PPh Pasal 21/26

Pengusaha hotel **wajib memotong PPh Pasal 21/26**, antara lain atas pembayaran:

- Gaji Karyawan
- Pesangon
- Tenaga Ahli



PPh Pasal 21/26

PEGAWAI

TETAP

PH.NETO-PTKP

TIDAK TETAP

BULANAN

PH.BRUTO-PTKP

HARIAN

PH.BRUTO-450ribu

PH.BRUTO(4,5jt
s.d. 10,2jt)-PTKP
HARIAN

PH.BRUTO(>10jt)-
PTKP

***Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak***

PPh Pasal 21/26

BUKAN PEGAWAI

BERKESINAMBUNGAN

**PH.BRUTO-PTKP
BULANAN
(KUMULATIF)**

**TIDAK
BERKESINAMBUNGAN**

50% X PH.BRUTO

**KOMISARIS, MANTAN
PEGAWAI**

PH.BRUTO

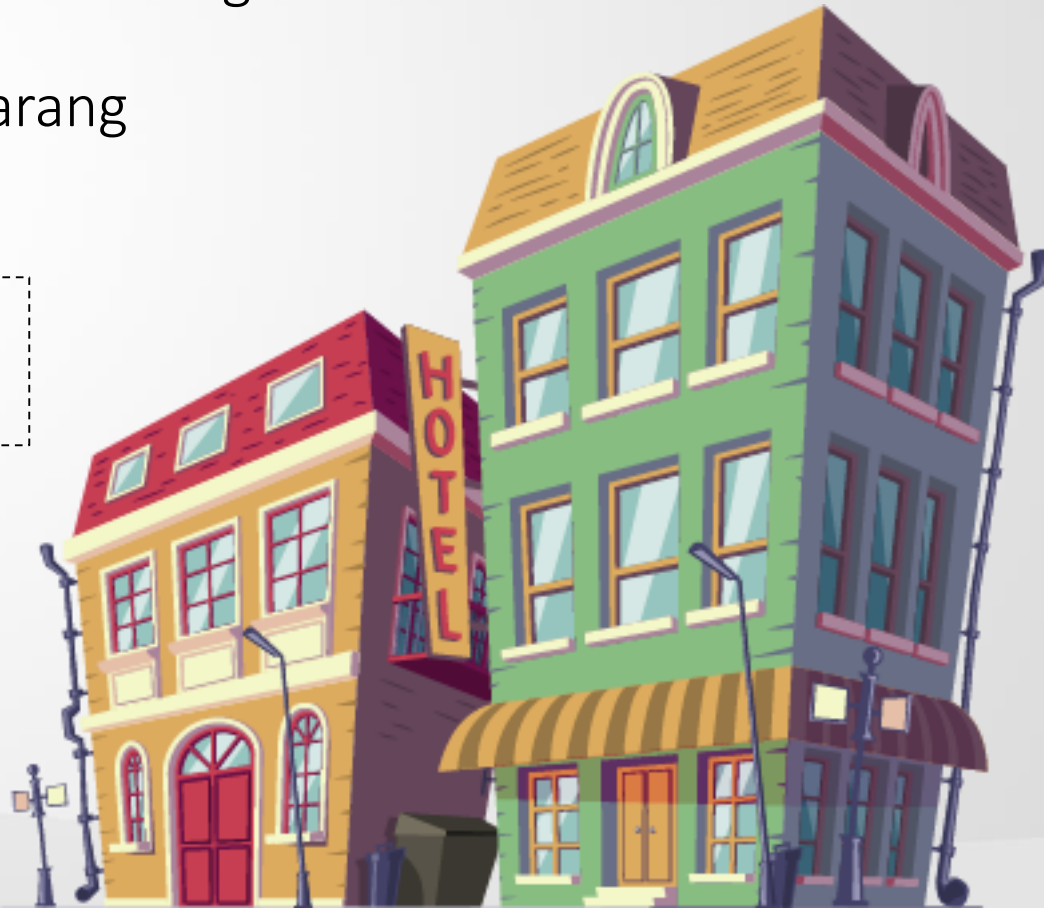
***Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak***

PPh Pasal 22

Hotel (berstatus BUMN) wajib memungut PPh Pasal 22 atas:

Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya

tarif efektif **1,5% x Harga Jual**
(belum termasuk PPN).



PPh Pasal 23/26

Hotel wajib memungut PPh Pasal 23, antara lain atas pembayaran:

- | | |
|---|--|
| ☐ DIVIDEN (Selain Dividen ke OP / ke PT dengan penyertaan saham diatas 25%) | ☐ SEWA (Selain sewa tanah dan bangunan) |
| ☐ BUNGA (kecuali bank) | ☐ IMBALAN sehubungan dengan: |
| ☐ ROYALTI | - jasa teknik |
| ☐ HADIAH DAN PENGHARGAAN | - jasa manajemen |
| sehubungan dengan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 | - jasa konsultan |
| | - jasa lain yang ditetapkan peraturan Menkeu (PMK Nomor 141/PMK.03/2015) |

TARIF

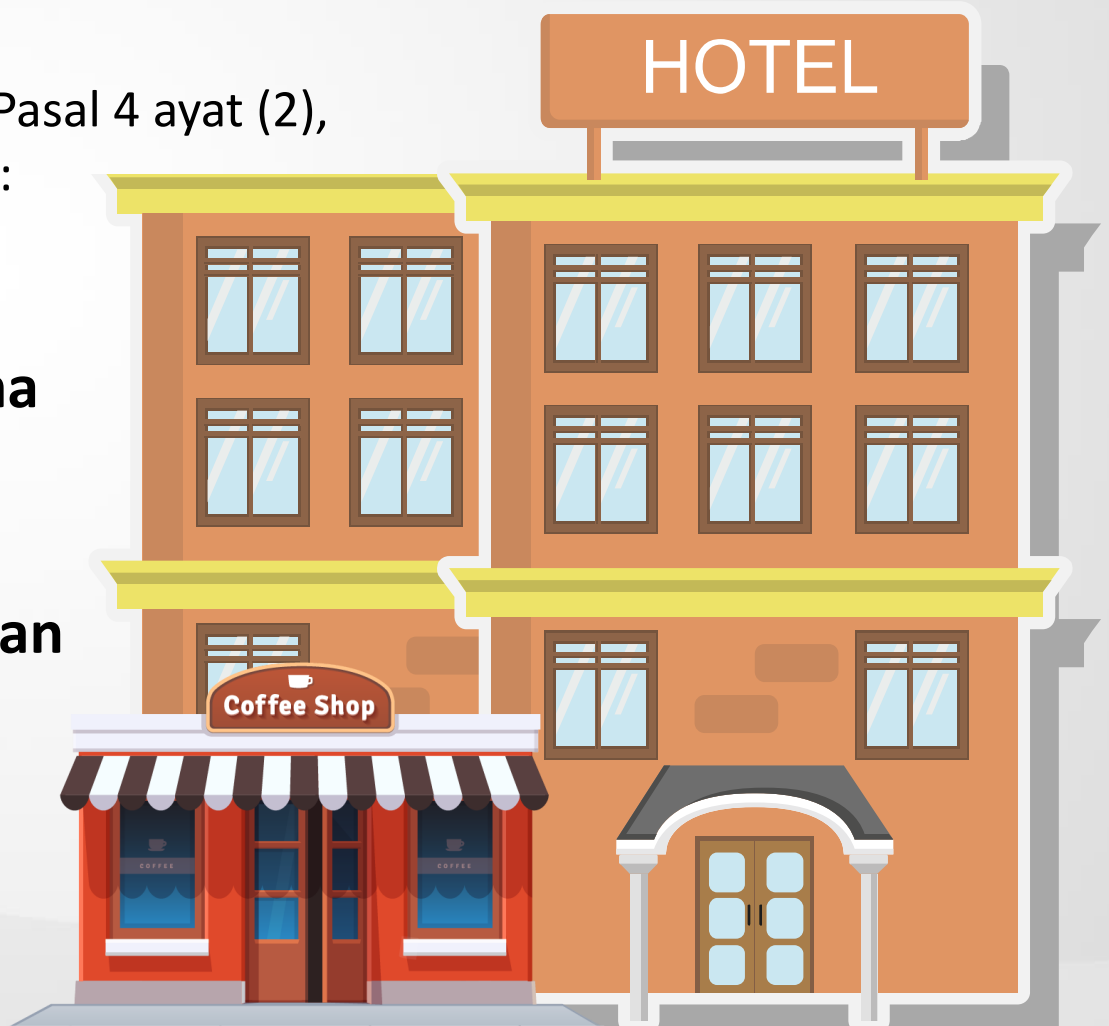
15%

2%

PPh Pasal 4 ayat 2

Hotel wajib memungut PPh Pasal 4 ayat (2),
antara lain atas pembayaran:

- ✓ **Hadiah Undian**
- ✓ **Dividen yang diterima
WP Orang Pribadi
Dalam Negeri**
- ✓ **Sewa Tanah/Bangunan**



PPN

Terkait Usaha Perhotelan

Pasal 2 PMK-43/PMK.010/2015

- Pada prinsipnya semua barang dan jasa dikenakan PPN, hanya saja ada pengecualian.
- **Jasa perhotelan** yang **tidak dikenai** PPN meliputi:
 1. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
 2. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

PPN

Terkait Usaha Perhotelan

Pasal 3 PMK-43/PMK.010/2015

➤ **TIDAK TERMASUK** jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN antara lain:

1. jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel, *antara lain sewa ruangan untuk ATM, kantor, perbankan, estoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik;*
2. jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk tambahannya, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya, serta fasilitas penunjang terkait lainnya (*didasarkan atas izin usahanya*); dan
3. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan.



Bayar



pembayaran pajak harus
menggunakan **e-Billing**



1. Buat Kode *Billing*



djponline.pajak.go.id



Datang langsung ke Kantor Pajak



Penyedia Jasa Aplikasi



Teller Bank Tertentu

2. Bayar *Billing*



Bank



Kantor Pos



Mesin ATM



SMS Banking



Internet Banking



Mesin EDC

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran Pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban dalam 1 (satu) tahun pajak.



Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, wajib pajak wajib melaporkan **Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan** sesuai dengan kriteria perpajakan* melalui beberapa sarana.



- ✓ eSPT
- ✓ efiling
- ✓ Pos
- ✓ KPP / KP2KP

Kewajiban	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 21	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *)
PPh Pasal 25 (<i>Angsuran Tahun Berjalan</i>)	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *)
PPh Pasal 4 ayat (2) “Setor Sendiri”	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *)
PPh Pasal 29 (<i>Kurang Bayar SPT Tahunan</i>)	Paling lama dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan	Paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak

*) SSP atas pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang telah mendapat validasi NTPN, tidak perlu melaporkan SPT Masa.

Terima Kasih



 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  1500-200